

PERBANDINGAN ANTARA SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL DAN SISTEM EKONOMI ISLAM

Ericha Putri Cahyani¹, Yunita Ratna Sari², Zahra Wifitya Ibtisamah³, Muhamad Faqih⁴,
Amelia Tanti Kurniawati⁵

¹⁻⁵ Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, Akuntansi Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: ep3119956@gmail.com, yunitarsari06@gmail.com, zwifitya@gmail.com,
feribesterdays@gmail.com, amelkurniawati99@gmail.com,

ABSTRACT

This study examines the fundamental differences between the conventional economic system and the Islamic economic system in terms of principles, objectives, and practices. The conventional system emphasizes individual freedom, maximum profit, and market mechanisms, yet often results in social inequality and instability. In contrast, the Islamic economic system is based on sharia values such as monotheism (tauhid), justice, maslahah (public benefit), ta'awun (mutual assistance), balance, and the prohibition of usury (riba), aiming to achieve fair wealth distribution through zakat, infak, sadaqah, waqf (ZISWAF), and profit-sharing schemes. This research applies a qualitative method with a literature review, analyzing conventional and Islamic economic studies using a descriptive-comparative approach. The findings indicate that the conventional system excels in flexibility and innovation, while the Islamic system highlights morality and social justice. The study concludes that adopting a dual system, as practiced in Indonesia, offers a strategic solution for building an inclusive, equitable, and sustainable economy.

Keywords: Economy, Conventional, Islam

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbedaan mendasar antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam dalam prinsip, tujuan, serta praktiknya. Sistem konvensional berorientasi pada kebebasan individu, keuntungan maksimal, dan mekanisme pasar, namun sering menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakstabilan. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam berlandaskan nilai syariah seperti tauhid, keadilan, maslahah, ta'awun, keseimbangan, serta larangan riba, dengan tujuan menciptakan distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF), dan sistem bagi hasil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian kepustakaan, menganalisis literatur ekonomi konvensional dan Islam secara deskriptif-komparatif. Hasil menunjukkan bahwa sistem konvensional unggul dalam fleksibilitas dan inovasi, sedangkan sistem Islam menonjol dalam aspek moral dan keadilan sosial. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan sistem ganda seperti di Indonesia dapat menjadi solusi strategis untuk membangun ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Prefix DOI :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

 Musytari

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata kunci: <i>Ekonomi, Konvensional, Islam</i>	
--	--

A. PENDAHULUAN

Sistem keuangan merupakan struktur penting ekonomi negara, lembaga ini bertanggung jawab guna memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi melalui penyediaan layanan keuangan bank serta lembaga keuangan lainnya. Mengingat urgensi institusi ini guna kelancaran transaksi keuangan serta pengelolaan ekonomi, pelestariannya sangat penting bagi kesehatan ekonomi nasional.¹

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi bisa ditelusuri atas munculnya beragam institusi keuangan, khususnya perbankan. Pada awalnya, sistem keuangan di Indonesia didominasi oleh lembaga konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga dan berorientasi pada pencapaian keuntungan maksimal.

Secara global, sistem keuangan saat ini banyak mengadopsi pendekatan berbasis bunga. Instrumen bunga menjadi komponen utama dalam kebijakan ekonomi, baik dalam ranah moneter maupun fiskal. Namun, dari sudut pandang kritis, sistem ini dinilai menciptakan ketimpangan, di mana negara-negara berkembang menjadi sangat bergantung secara finansial kepada negara maju. Mekanisme pengembalian yang telah ditentukan sebelumnya mendorong pemilik modal untuk lebih memilih sektor keuangan sebagai sumber pendapatan daripada sektor riil yang produktif. Akibatnya, ketimpangan finansial global semakin dalam, dengan negara maju terjebak dalam kecanduan utang dan negara miskin terus terjerat dalam lingkaran utang yang membesar.

Sistem keuangan negara sangat dipengaruhi sistem ekonominya. Semua sistem serta proses yang mengatur produksi, konsumsi, serta distribusi pendapatan tercermin dalam sistem ekonomi. Faktor-faktor seperti ideologi, kepercayaan, budaya, politik, dan kondisi geografis turut membentuk sistem ekonomi tersebut.

Sektor riil dan sektor keuangan merupakan dua pilar dasar dari setiap sistem ekonomi. Dibandingkan dengan sektor riil, sektor keuangan telah berkembang dengan laju yang lebih cepat dalam kerangka ekonomi Islam. Selama 40 tahun terakhir, keuangan Islam telah berkembang pesat, memainkan peran vital dalam perekonomian di seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara Muslim. Sistem keuangan global kini mencakup pembiayaan Islam, yang membantu diversifikasi risiko dan menjaga stabilitas keuangan global. Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia memiliki sistem ekonomi hibrida yang menggabungkan sistem moneter Barat dan Islam.

Secara teoritis, operasional, serta praktis, keuangan Islam menghadapi sejumlah hambatan, meskipun pertumbuhannya cepat. Diperlukan filosofi serta aturan yang lebih kokoh yang didasarkan pada distribusi adil keuntungan serta kerugian, setidaknya secara teoritis. Dari segi operasionalnya, dibutuhkan inovasi, intermediasi, serta penanganan risiko yang efektif. Sementara itu, implementasi sistem keuangan Islam harus disesuaikan dengan regulasi dan kondisi ekonomi masyarakat. Hambatan seperti lemahnya pengawasan dan regulasi yang belum optimal menjadi faktor pembatas efisiensi sistem perbankan Islam, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan fiskal dan moneter.

Keuangan modern berfungsi sebagai senjata sosial dan politik yang kuat, selain sebagai alat ekonomi. Distribusi sumber daya yang langka dan pemeliharaan pertumbuhan ekonomi yang stabil keduanya dipengaruhi olehnya. Semua dana publik dipercayakan kepada lembaga

¹ Enceng I. S. & Deni F. K. *Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam dan Konvensional*. Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, Vol. 4, No. 2 (2020), hal. 256.

keuangan; oleh karena itu, lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk menggunakan dana tersebut secara adil dan efisien demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Secara sederhana, sistem keuangan adalah kerangka kerja di mana sumber daya moneter ekonomi ditetapkan dan dikelola. Fungsi utamanya adalah mengalihkan kekayaan dari yang kaya ke yang miskin, dipergunakan dalam konsumsi dan investasi. Karenanya, sistem keuangan memainkan peran yang esensial dan tidak terbantahkan dalam mendorong ekspansi ekonomi serta memprediksi arah perkembangan ekonomi.

Studi berfokus pada dua hal utama: pertama, mengidentifikasi perbedaan sistem keuangan konvensional serta Islam; kedua, mengevaluasi kelebihan serta kekurangan tiap sistem tersebut.

B. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Telaah literatur dalam penelitian ini berfokus pada perbandingan sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam, serta bagaimana keduanya dapat dikaitkan dalam kerangka konseptual untuk menjawab permasalahan penelitian. Sistem ekonomi konvensional berakar pada pemikiran klasik seperti Adam Smith yang menekankan kebebasan individu dan mekanisme pasar sebagai pengatur utama. Gregory Mankiw (2015) merumuskan prinsip-prinsip dasar ekonomi konvensional, di antaranya kebebasan memilih, orientasi pada keuntungan, serta peran pasar dalam menentukan harga. Walaupun sistem ini fleksibel dan adaptif terhadap inovasi, literatur menunjukkan bahwa ia sering menimbulkan kesenjangan sosial serta rentan terhadap krisis keuangan (Novita, 2015).

Sebaliknya, sistem ekonomi Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah dengan tujuan menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Mannan (1992) menekankan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan ridha Allah. Prinsip kejujuran, larangan riba, kewajiban zakat, serta distribusi kekayaan yang adil menjadi ciri khas sistem ini (Halide dalam Daud Ali, 1988). Kevin A. K. dkk. (2023) menambahkan bahwa ekonomi Islam memiliki keunggulan berupa larangan riba, penerapan zakat, dan orientasi pada masalah, meskipun masih menghadapi tantangan regulasi dan keterbatasan produk keuangan syariah.

Dari telaah literatur tersebut, dapat dikembangkan hipotesis bahwa sistem ekonomi konvensional berasosiasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan keragaman instrumen keuangan, tetapi berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam berasosiasi positif dengan pemerataan distribusi kekayaan, stabilitas sosial, serta dorongan pada sektor riil. Hipotesis lain yang muncul adalah bahwa penerapan sistem ganda (dual system) seperti di Indonesia mampu memoderasi kelemahan masing-masing sistem, sehingga menghasilkan ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, hubungan antar konsep yang dibangun dalam penelitian ini menegaskan bahwa integrasi kedua sistem dapat menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

C. METODE PENELITIAN

Studi mempergunakan desain kualitatif beserta desain kajian kepustakaan. Data disatukan atas beragam sumber literatur contohnya jurnal ilmiah, buku ekonomi konvensional serta Islam, serta artikel akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara kedua sistem. Fokus utama adalah pada prinsip dasar, karakteristik, beserta kelebihan kekurangan tiap sistem.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Ekonomi Konvensional

Sistem ekonomi konvensional ialah sistem terbanyak dipergunakan negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dalam sistem ini, setiap individu atau pelaku ekonomi diberikan kebebasan penuh untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, seperti memproduksi barang, menjual jasa, berdagang, dan menentukan harga. Artinya, siapa pun boleh menjalankan usaha atau bisnis sesuai dengan keinginan dan kemampuannya masing-masing tanpa banyak campur tangan dari pemerintah.

Namun, dalam praktiknya, pemerintah bisa saja ikut terlibat guna atur serta awasi aktivitas ekonomi agar lancar serta tidak merugikan masyarakat. Tapi di sisi lain, ada juga sistem ekonomi konvensional yang membiarkan pasar bekerja sepenuhnya tanpa intervensi pemerintah, yang dikenal sebagai sistem ekonomi pasar bebas.²

Karakter khas sistem ini ialah persaingan bebas. Setiap orang atau perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Mereka berlomba-lomba menarik konsumen, meningkatkan produksi, dan menekan biaya agar bisa menang dalam persaingan. Sayangnya, sistem ini sering kali menimbulkan kesenjangan sosial. Orang-orang yang memiliki modal besar dan kemampuan tinggi cenderung menjadi semakin kaya, sementara mereka yang tidak memiliki akses terhadap modal atau pendidikan bisa semakin tertinggal. Akibatnya, muncul jarak pemisah kelompok kaya serta miskin dalam masyarakat.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Konvensional

Menurut Gregory Mankiw (seorang ahli ekonomi makro Amerika yang saat ini menjabat sebagai Profesor Ekonomi Robert M. Beren di Universitas Harvard):

1. Setiap individu selalu berhadapan dengan berbagai alternatif pilihan, sehingga keputusan ekonomi pada dasarnya merupakan proses memilih di antara beragam opsi yang tersedia.
2. Biaya nyata dari suatu tindakan tidak hanya berupa pengeluaran uang, tetapi meliputi seluruh nilai dari kesempatan terbaik yang harus ditinggalkan untuk memperoleh pilihan tersebut.
3. Individu yang bertindak rasional melakukan evaluasi berdasarkan konsep biaya marjinal dan manfaat marjinal, yaitu mempertimbangkan perubahan kecil dari suatu keputusan sebelum mengambil tindakan.
4. Perilaku manusia cenderung merespons insentif; perubahan pada biaya atau manfaat suatu tindakan akan memengaruhi cara seseorang membuat keputusan ekonomi.
5. Aktivitas perdagangan antarpihak dapat meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, karena memungkinkan masing-masing pihak untuk memfokuskan diri pada kegiatan yang lebih efisien.
6. Mekanisme pasar umumnya merupakan sarana efektif untuk mengoordinasikan aktivitas ekonomi, karena harga berfungsi sebagai sinyal yang mengarahkan keputusan produsen dan konsumen.
7. Pemerintah memiliki peran dalam meningkatkan efisiensi pasar atau mendorong pemerataan ketika terjadi kegagalan pasar atau ketidakadilan distribusi.
8. Tingkat kesejahteraan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonominya dalam menghasilkan barang dan jasa secara produktif.
9. Peningkatan jumlah uang beredar dalam perekonomian merupakan salah satu penyebab utama terjadinya inflasi, karena tekanan permintaan terhadap jumlah barang dan jasa yang terbatas.

² Novita L. *Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No. 1 (2015), hal. 70.

10. Rentang pendeknya, penduduk merasakan trade-off inflasi serta pengangguran, di mana kebijakan yang menurunkan inflasi cenderung meningkatkan pengangguran, dan sebaliknya.³

Ciri-Ciri Ekonomi Konvensional

1. Kebebasan Individu dalam Kegiatan Ekonomi
Dalam sistem ekonomi konvensional, setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai keinginannya. Mereka boleh memilih pekerjaan, membuka usaha, menjual barang, atau menetapkan harga tanpa banyak campur tangan dari pemerintah atau aturan agama. Kebebasan ini dianggap penting agar orang bisa berinovasi dan bersaing secara sehat.
2. Berorientasi pada Keuntungan Pribadi
Tujuan utama dari kegiatan ekonomi dalam sistem ini adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Setiap pelaku ekonomi, baik individu maupun perusahaan, akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya. Keputusan ekonomi dibuat berdasarkan logika untung dan rugi, bukan berdasarkan nilai moral atau agama.
3. Pasar Menjadi Penentu Utama
Dalam ekonomi konvensional, pasar memiliki peran yang sangat besar. Harga barang dan jasa ditetapkan kekuatan permintaan serta penawaran. Bilamana permintaan tinggi serta barang sedikit, jadi harga naik. Sebaliknya, bilamana barang banyak tapi permintaan rendah, harga turun. Pemerintah biasanya tidak ikut campur dalam penentuan harga, kecuali dalam keadaan darurat.
4. Peran Pemerintah Terbatas
Pemerintah dalam sistem ini hanya berperan sebagai pengawas atau pengatur agar pasar berjalan dengan lancar. Pemerintah tidak ikut campur terlalu dalam dalam kegiatan ekonomi, kecuali untuk menjaga stabilitas, mencegah praktik curang, atau melindungi konsumen. Ini berbeda dengan sistem ekonomi yang lebih terpusat, di mana pemerintah mengatur hampir semua aspek ekonomi.
5. Tidak Terikat oleh Nilai Agama atau Moral
Ekonomi konvensional bersifat sekuler, artinya tidak terikat oleh ajaran agama tertentu. Aktivitas ekonomi dinilai dari sisi efisiensi dan hasil, bukan dari halal atau haramnya. Etika bisnis ditentukan oleh hukum negara dan norma sosial, bukan oleh syariat atau wahyu. Selama tidak melanggar hukum, maka suatu kegiatan ekonomi dianggap sah.
6. Pertumbuhan Ekonomi sebagai Ukuran Keberhasilan
Keberhasilan suatu negara dalam sistem ini diukur dari pertumbuhan ekonomi, seperti kenaikan PDB, total investasi, dan keuntungan perusahaan. Semakin tinggi angka-angka ini, maka dianggap semakin sukses. Namun, aspek pemerataan dan kesejahteraan sosial sering kali kurang diperhatikan.
7. Kesenjangan Sosial Dianggap Wajar
Dalam sistem ini, perbedaan antara orang kaya dan miskin dianggap sebagai hal yang wajar dan alami. Mereka yang bekerja keras dan punya modal besar akan mendapatkan hasil lebih banyak. Sementara itu, mereka yang kurang beruntung harus bersaing lebih keras. Sistem ini tidak secara aktif mendorong pemerataan kekayaan, kecuali melalui pajak atau bantuan sosial yang terbatas.

³ In Wikiversity. *10 principles of economics*. Retrieved from https://en.wikiversity.org/wiki/10_Principles_of_Economics. Retrieved November 21, 2025.

2. Sistem Ekonomi Islam

Prinsip serta ajaran Islam menjadi dasar sistem ekonomi Islam, yang berbeda dari model-model konvensional. Menurut M.A. Manan dalam bukunya *Theory and Practice of Islamic Economics* (1992:19), umat Islam mempelajari ekonomi Islam untuk memahami cara mengelola keuangan komunitas mereka. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada menghasilkan uang, tetapi juga memprioritaskan melakukan hal yang benar, bersikap adil, dan membantu orang lain sukses.

Sementara itu, menurut H. Halide (dikutip dalam Daud Ali, 1988:3), ekonomi Islam adalah kumpulan pengetahuan yang mengacu pada ajaran Al-Qur'an dan teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam urusan keuangan. Kejujuran dalam perdagangan, larangan penggunaan bunga (riba), kewajiban zakat, larangan menimbun barang, dan distribusi kekayaan yang adil merupakan prinsip-prinsip sistem ini.⁴

Titik tengah antara kesejahteraan pribadi dan publik adalah tujuan ekonomi Islam, untuk merumuskannya kembali. Berbisnis dengan cara yang halal (legal), adil, dan tidak merugikan orang lain adalah hal yang esensial. Pemerintah dalam sistem ini juga memiliki peran penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan tidak menimbulkan ketidaksetaraan sosial.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam seperti:

1. Prinsip Tauhid (Keesaan Allah SWT)

Berlatih Tauhid berarti meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang lebih besar dari Allah SWT, Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, dan hal ini mencakup urusan keuangan. Menurut teori ekonomi Islam, konsep Tauhid menyatakan bahwa Allah secara hakiki memiliki semua harta benda, termasuk uang, tanah, dan sumber daya lainnya. Hanya mereka yang mampu mengelolanya dengan baik yang dipercayakan untuk melakukannya.

Karenanya, berdagang dalam segala situasi memerlukan pertanggungjawaban penuh kepada sesama manusia serta Allah SWT. Selain mencari keuntungan, visi akhir dari aktivitas ekonomi ialah berkah bagi orang lain serta ridha Allah. Ide ini memberikan kerangka moral agar mereka yang terlibat dalam ekonomi tidak terlibat dalam praktik-praktik tidak etis seperti penipuan, kecurangan, atau eksploitasi.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip dasar dalam keyakinan Islam adalah keadilan. Keadilan dalam ekonomi Islam berarti tidak memanfaatkan orang lain, memberikan hak kepada mereka yang berhak mendapatkannya, serta memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk menjadi kaya. Keadilan ekonomi mencakup:

- a. Memenuhi kebutuhan primer manusia (sandang, pangan, papan).
- b. Mendapatkan penghasilan dari sumber yang halal.
- c. Mendistribusikan kekayaan secara merata agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya.
- d. Menjaga stabilitas ekonomi agar tidak terjadi krisis yang merugikan masyarakat kecil.

3. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan Umum)

Maslahah berarti semua yang membawa kebermanfaatan serta cegah kerugian atau kerusakan. Dalam ekonomi Islam, prinsip ini digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan, produk, atau transaksi membawa kebaikan bagi masyarakat luas.

Misalnya, jika suatu kebijakan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, maka itu dianggap sesuai dengan prinsip maslahah. Sebaliknya, jika suatu praktik

⁴ Novita L. *Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No. 1 (2015), hal. 73.

ekonomi menyebabkan kerusakan lingkungan, eksploitasi buruh, atau ketimpangan sosial, maka itu bertentangan dengan prinsip ini.

Prinsip masalah juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi yang tidak terang-terangan disebutkan Al-Qur'an atau Hadis, tetapi tetap sejalan dengan tujuan syariat (maqashid syariah).

4. Prinsip Ta'awun (Tolong-Menolong)

Ta'awun merupakan semangat kerja sama dan saling membantu dalam kebaikan. Pada ekonomi Islam, prinsip mensupport adanya sistem ekonomi yang inklusif serta tidak individualistik. Contoh penerapan prinsip ta'awun:

- a. Pembentukan koperasi syariah yang dimiliki bersama oleh anggotanya.
- b. Skema pembiayaan mikro untuk UMKM tanpa bunga.
- c. Program wakaf produktif untuk membiayai pendidikan atau layanan kesehatan.

Dengan prinsip, ekonomi Islam tidak hanya berfokus ke keuntungan pribadi, melainkan memperkuat solidaritas sosial serta memperkecil kesenjangan ekonomi.

5. Prinsip Keseimbangan

Semua ranah Ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Keseimbangan ini mencakup:

- a. Keselarasan ranah keuangan serta riil (produksi barang serta jasa nyata).
- b. Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.
- c. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
- d. Keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Ekonomi syariah fokusnya tidak hanya pada tumbuhnya korporasi besar. Namun memperhatikan pengembangan UMKM, agar pembangunan ekonomi tidak timpang dan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.⁵

6. Prinsip Takaful (Perlindungan dan Jaminan Sosial)

Takaful berasal dari Bahasa Arab "kafalah" yang artinya saling menjamin. Prinsip ini menekankan pentingnya sistem perlindungan bersama dalam menghadapi risiko kehidupan, seperti sakit, kecelakaan, atau kematian. Hal ini pada ekonomi konvensional disebut dengan asuransi. Pada ekonomi Islam, takaful menjadi alternatif karena tidak ada riba, gharar (ketidakpastian), serta maisir (judi).

Dalam sistem takaful, peserta saling menyumbang ke dalam dana bersama yang dikelola secara syariah. Jika salah satu peserta mengalami musibah, dana tersebut digunakan untuk membantu mereka. Prinsip ini mencerminkan nilai solidaritas, keadilan, dan tolong-menolong.

Ciri-Ciri Ekonomi Islam

1. Kekayaan adalah Milik Allah, Manusia Hanya Sebagai Pengelola

Tanah, air, emas, barang-barang pertanian, dan semua harta benda di bumi dianggap sebagai milik Allah SWT dalam Islam. Hak mutlak atas sumber daya ini tidak dimiliki oleh manusia; mereka hanyalah pengelola atau penjaga (khalifah). Oleh karena itu, manusia tidak boleh boros, tidak boleh merusak, dan tidak boleh menimbun semua harta mereka untuk diri sendiri. Sebab di akhirat, semuanya akan dipertanggungjawabkan.

2. Ekonomi Terhubung dengan Iman, Hukum Islam, dan Etika

Ekonomi dalam Islam tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan keimanan kepada Allah, hukum syariah, dan nilai-nilai moral. Artinya, kegiatan ekonomi seperti berdagang, bekerja, atau berinvestasi harus dilakukan sesuai dengan aturan Islam. Misalnya, tidak boleh

⁵ Kevin A. K., dkk. *Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional: Kelebihan dan Kekurangan*. Journal Islamic Education, Vol. 1 No. 3 (2023), hal. 449–450.

menipu, tidak boleh menjual barang haram, dan harus jujur dalam transaksi. Tujuan ekonomi bukan hanya mencari untung, tetapi juga mencari keberkahan dan ridha Allah.

3. Keseimbangan antara Aspek Spiritual dan Materi

Islam tidak hanya memperhatikan aspek duniawi seperti keuntungan dan kekayaan, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual seperti kejujuran, niat yang baik, dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi Islam, seseorang boleh menjadi kaya, tetapi kekayaannya harus digunakan untuk kebaikan. Misalnya, dengan membantu fakir miskin, membayar zakat, dan tidak hidup berlebihan. Jadi, ekonomi Islam mengajarkan keselarasan kebutuhan jasmani serta rohani.

4. Menjaga Keseimbangan Kepentingan Individu serta Kepentingan Umum

Islam menghormati hak individu untuk memiliki harta dan menjalankan usaha, tetapi juga menekankan pentingnya kepentingan masyarakat. Artinya, seseorang tidak boleh mencari keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan orang lain. Misalnya, menaikkan harga secara tidak wajar, menimbun barang, atau memonopoli pasar. Ekonomi Islam mendorong agar setiap orang bisa sejahtera bersama, bukan hanya segelintir orang saja.

5. Kebebasan Individu Dihormati

Islam membagikan rasa bebas kepada setiap orang agar bekerja, berdagang, dan mengembangkan usahanya. Namun, kebebasan ini tidak boleh disalahgunakan. Setiap kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab dan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, seseorang bebas membuka usaha, tetapi tidak boleh menjual barang haram atau melakukan praktik curang. Kebebasan dalam Islam selalu diiringi dengan batasan moral dan hukum syariah.

6. Negara Berperan dalam Mengatur Perekonomian

Dalam sistem ekonomi Islam, negara tidak bersikap pasif. Guna memastikan semua kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan benar serta sesuai dengan hukum syariah, negara wajib mengawasi serta mengendalikan kegiatan tersebut. Selain menyediakan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur, negara juga berkewajiban melindungi hak-hak individu serta melarang kegiatan ekonomi yang merugikan. Pengelolaan dana sosial seperti zakat serta waqf merupakan cara lain bagi negara untuk membantu dalam distribusi kekayaan.

7. Zakat sebagai Alat Distribusi Kekayaan

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang hartanya telah mencapai batas tertentu (nisab). Selain sebagai praktik keagamaan, zakat dapat membantu mengurangi ketidakadilan sosial. Ketika individu membayar zakat, sebagian dari kekayaan mereka disalurkan kepada mereka yang kurang beruntung, termasuk orang miskin, yatim piatu, dan mereka yang membutuhkan. Dalam ekonomi Islam, ini merupakan contoh konkret dari keadilan sosial.

8. Larangan Riba (Bunga)

Praktik mengenakan bunga pada pinjaman, yang dikenal sebagai riba, sepenuhnya dilarang dalam Islam. Riba dianggap tidak adil karena menguntungkan satu pihak atas kerugian pihak lain tanpa memerlukan usaha apa pun dari pihak tersebut. Sistem pembagian keuntungan yang lebih adil dan transparan, seperti mudharabah dan musyarakah, telah menggantikan riba dalam ekonomi Islam. Visi melarang riba guna membangun sistem moneter yang sehat, aman, serta egaliter.

3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Konvensional dan Sistem Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi Konvensional

lalah sistem umum dipergunakan di banyak negara, baik yang menganut kapitalisme maupun sosialisme. Fokus utamanya adalah efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan keuntungan.

Kelebihan:

1. **Fleksibel dan adaptif**
Sistem ini sangat terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Misalnya, teknologi baru atau model bisnis baru bisa cepat diadopsi tanpa banyak hambatan.
2. **Pertumbuhan ekonomi yang cepat**
Karena berorientasi pada keuntungan dan efisiensi, sistem ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu singkat.
3. **Banyak pilihan produk dan layanan keuangan**
Saham, obligasi, reksa dana, dan berbagai produk keuangan lainnya semuanya tersedia melalui sistem ini. Investor dan pelaku usaha memiliki banyak alternatif berkat hal ini.
4. **Mendorong kompetisi dan efisiensi**
Kualitas produk dan layanan serta efisiensi sumber daya meningkat berkat persaingan sehat di antara pelaku ekonomi.

Kekurangan:

1. **Kesenjangan sosial dan ekonomi**
Karena fokus pada keuntungan, sistem ini seringkali mengabaikan aspek keadilan sosial. Akibatnya, terjadi kesenjangan si kaya dan si miskin.
2. **Rentan atas krisis keuangan**
Ketergantungan pada bunga dan spekulasi membuat sistem ini rawan mengalami krisis, seperti yang terjadi pada krisis finansial global tahun 2008.
3. **Kurangnya dimensi etika**
Dalam banyak kasus, keputusan ekonomi hanya didasarkan pada keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau lingkungan. Misalnya, perusahaan bisa saja merusak lingkungan demi efisiensi biaya.
4. **Konsumerisme dan materialisme**
Sistem ini cenderung mendorong gaya hidup konsumtif dan mengejar materi, yang bisa berdampak negatif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya.

Sistem Ekonomi Islam

Prinsip hukum Islam, atau Syariah, jadi landasan sistem ekonomi Islam. Pencarian keuntungan merupakan hal yang sekunder dibandingkan dengan tujuan utamanya, yaitu menegakkan keadilan sosial serta mendorong kemakmuran bersama.

Kelebihan:

1. **Berlandaskan nilai moral dan etika**
Dalam ekonomi Islam, tiap aktivitas ekonomi wajib selaras nilai-nilai moral. Misalnya, tidak boleh ada penipuan, eksploitasi, atau ketidakadilan. Ini membuat sistem ini lebih manusiawi dan berorientasi pada kebaikan bersama.
2. **Larangan riba (bunga)**
Salah satu ciri khas ekonomi Islam adalah larangan riba. Artinya, tidak boleh ada bunga dalam transaksi pinjam-meminjam. Sebagai gantinya, digunakan sistem bagi hasil lebih adil bagi kedua belah pihak.
3. **Zakat dan redistribusi kekayaan**
Ekonomi Islam mewajibkan umat Muslim yang mampu untuk membayar zakat. Dana zakat dipergunakan bantu orang miskin serta menaikkan kemaslahatan penduduk. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial.
4. **Menghindari spekulasi dan ketidakpastian (gharar)**
Transaksi yang mengandung unsur spekulasi tinggi atau ketidakpastian dilarang. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi pihak yang lemah.
5. **Mendorong investasi produktif**

Karena tidak ada bunga, orang lebih terdorong untuk menginvestasikan uangnya dalam kegiatan usaha yang nyata dan produktif, bukan hanya menyimpan uang di bank.

Kekurangan:

1. Kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat
Banyak orang, termasuk umat Muslim sendiri, belum memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam secara mendalam. Hal ini membuat penerapannya belum maksimal.
2. Keterbatasan produk keuangan syariah
Dibandingkan dengan sistem konvensional, produk-produk keuangan syariah masih terbatas dan kurang variatif. Ini membuat masyarakat kadang merasa kurang fleksibel.
3. Belum merata secara global
Sistem ini belum diterapkan secara luas pada seluruh dunia. Bahkan di negara yang mayoritas beragama Muslim, sistem ekonomi Islam masih berjalan berdampingan dengan sistem konvensional.
4. Tantangan dalam regulasi dan pengawasan
Diperlukan lembaga pengawas syariah kokoh guna pastikan seluruh produk serta pelayanan selaras prinsip Islam. Tidak selalu mudah dilakukan.

5. Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam

Dalam dunia yang kompleks saat ini, seringkali dilakukan perbandingan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Pengelolaan sumber daya, regulasi transaksi, dan promosi kesejahteraan publik adalah bidang-bidang di mana kedua ideologi tersebut berbeda. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan ide-ide filosofis yang mendasari keduanya, selain karakter teknisnya.

Sistem Ekonomi Konvensional: Efisiensi dan Pertumbuhan

Berfokus ke efisiensi pasar, kebebasan individu, serta pertumbuhan ekonomi. Sistem ini memungkinkan siapa pun untuk berinovasi dan bersaing secara bebas, dengan harapan bahwa mekanisme pasar akan menciptakan keseimbangan dan kemakmuran.

Kelebihan sistem ini terletak pada fleksibilitasnya dalam merespons perubahan dan inovasi. Instrumen keuangan yang beragam, seperti saham, obligasi, dan derivatif, memberikan banyak pilihan bagi investor dan pelaku usaha. Selain itu, sistem ini telah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat di banyak negara.

Namun, sistem ini juga memiliki sisi gelap. Ketimpangan distribusi kekayaan sering kali menjadi masalah serius, karena sistem ini cenderung menguntungkan mereka yang sudah memiliki modal besar. Selain itu, krisis keuangan yang berulang, seperti krisis global 2008, menunjukkan bahwa sistem ini rentan terhadap spekulasi dan ketidakstabilan. Kurangnya dimensi etika dalam pengambilan keputusan ekonomi juga menjadi sorotan, terutama ketika keuntungan jangka pendek lebih diutamakan daripada dampak sosial serta lingkungan.

Holistiknya, sistem ekonomi Islam dan konvensional menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mencapai tujuan ekonomi. Ekonomi Islam menekankan keadilan dan keberkahan, sementara ekonomi konvensional fokus pada efisiensi dan pertumbuhan. Keduanya punya kelebihan serta kekurangan serta praktiknya, banyak negara mencoba menggabungkan unsur-unsur dari kedua sistem guna terciptanya desain ekonomi jauh inklusif serta kontinuitas.

Sistem Ekonomi Islam: Etika sebagai Fondasi

Hukum Syariah, yang menjadi landasan ekonomi Islam, menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, berbeda dengan konvensional. Semua transaksi bisnis dalam sistem ini harus mematuhi standar etika dan moral Islam selain motif keuangan. Beberapa contoh perilaku yang dilarang adalah riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang

ekstrem), dan maysir (spekulasi/judi), yang semuanya dianggap tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

Zakat, infaq, dan waqf bekerja sama untuk mendistribusikan kekayaan, yang merupakan keunggulan utama sistem ini. Akibatnya, ketidaksetaraan sosial berkurang dan solidaritas antar manusia diperkuat. Manfaat lain dari skema pembiayaan berbagi keuntungan seperti musyarakah dan mudharabah adalah mereka mempromosikan kolaborasi yang adil antara pemilik modal dan manajemen perusahaan.

Namun, metode ini juga memiliki masalah. Kurangnya dukungan institusional untuk penerapan luas ekonomi Islam di banyak negara. Selain itu, terdapat kurangnya keragaman produk keuangan Islam dan tingkat pemahaman publik yang rendah atas prinsip ekonomi Islam.⁶

E. SIMPULAN

Secara prinsip, sistem ekonomi konvensional dan Islam memiliki perbedaan mendasar. Sistem konvensional menekankan kebebasan individu, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sering menimbulkan kesenjangan sosial dan rentan terhadap krisis. Sementara itu, sistem ekonomi Islam berlandaskan nilai-nilai syariah seperti tauhid, keadilan, kemaslahatan, kerja sama, keseimbangan, serta larangan riba, dengan tujuan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kedua sistem ini sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahan. Karena itu, penerapan sistem ganda seperti yang ada di Indonesia bisa menjadi jalan tengah untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan siap menghadapi tantangan global. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peningkatan literasi masyarakat, inovasi produk keuangan syariah, serta kebijakan yang mendukung integrasi kedua sistem agar kesejahteraan bersama dapat tercapai.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Budiono. (1998). *Ekonomi Makro*. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 (Edisi ke-4). Yogyakarta: BPFE.
- Fathurrahman, A. (2012). *Kebijakan fiskal Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam: Studi kasus dalam mengentaskan kemiskinan*. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 13(1), 72-82. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/1265>.
- Fauzia, A., Rambey, T., Fadilah, K., Humaid, H., Munir, A. M., Firmansyah, M., & Atig, A. J. J. (2023). *Studi literatur: Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia*. Jurnal Jaman, 3(1), 46-55. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/372212128>.
- Khoiry, K. A., Hafiz, M. A. S., & Ariansyah, N. R. (2023). *Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional: Kelebihan dan Kekurangan*. Journal Islamic Education, 1(3), 446-455. Retrieved from <https://share.google/dfM8Y7bFc94lFkqdv>.
- Lidyana, N. (2015). *Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam*. Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 67-80. Retrieved from <https://share.google/7s0fmtHT3DzrrXzut>.
- Mankiw, N. G. (2000). *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Muallif. (2024). *Krisis finansial 2008: Penyebab, dampak global, respon pemerintah, dan pelajaran berharga untuk masa depan*. Retrieved from <https://an-nur.ac.id/krisis-finansial-2008-penyebab-dampak-global-respon-pemerintah-dan-pelajaran-berharga-untuk-masa-depan/>.

⁶ Achmad F., dkk. *Studi literatur: Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia*. Jurnal Jaman, Vol. 3 No. 1 (2023), hal. 47-54.

- Mustofa, U. A., Hariyanda, M., Erdina, M. Y., Cintami, N., & Saputra, R. (2022). *Etika pembangunan berkelanjutan menurut perspektif ekonomi Islam*. Salam: Islamic Economics Journal, 3(1), 1-20. Retrieved from <https://doi.org/10.24042/slm.v3i1.12025>.
- Nisa, F. L., & Reswara, K. (2024). *Analisis perkembangan dan tantangan bank syariah dalam persaingan dengan bank konvensional di pasar keuangan modern*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 2(3), 120-125. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/383727427>.
- Sulaiman, K., & Maesarach, R. M. (2025). *A comparative analysis of the performance of Sharia and conventional equity mutual funds in Indonesia: A review of reputation, stock selection, and market timing*. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, 8(3), 8322-8336. Retrieved from <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/ijse/article/view/8151>.
- Syaripudin, E. I., & Furkony, D. K. (2020). *Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam dan Konvensional*. EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 4(2), 255-262. Retrieved from <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/139>.
- Wijayanto, B. (2023). *Islamic World View: Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies, 3(2), 112-125. Retrieved from <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/budai/article/view/41227/0>.
- Wikiversity. (n.d.). *10 principles of economics*. In Wikiversity. Retrieved from https://en.wikiversity.org/wiki/10_Principles_of_Economics.